

## ABSTRAKSI

### ASPEK HUKUM PERANAN BENDAHARAWAN DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI BIRO KEUANGAN SETDAPROPSU

OLEH

RISNAWATY

NPM : 97 840 0145

JURUSAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Sekretariat Wilayah Daerah Sumatera Utara adalah satu instansi pemerintah yang mempunyai peranan besar dalam pemerintahan di Propinsi Sumatera. Biro Keuangan adalah salah satu instansi pemerintah yang berada di bawahnya sedangkan Bendaharawan Biro Keuangan adalah salah satu Bidang dalam pelaksanaan tugas Biro tersebut. Keberadaan bendaharawan ini memegang peranan yang sangat penting sebagai pemegang wewenang penyaluran keuangan daerah sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 huruf d Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 954/2572/1992 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Bendaharawan Daerah Serta Atasan Langsung bendaharawan/Pimpinan proyek Tata Usaha bendaharawan Daerah, Tata Cara Pengeluaran Beban Tetap dan Beban Sementara, Serta Tata Cara Pertanggung Jawaban dan Pengiriman Surat Pertanggung Jawaban bendaharawan Daerah.

Dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah sebagai berikut : " Bagaimanakah sebenarnya kedudukan bendaharawan dalam pengelolaan administrasi keuangan di Biro Keuangan Setdapropsu apabila dihubungkan dengan keberadaan Hukum Administrasi Negara " .

Dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut : Pelaksanaan administrasi keuangan pada Bendaharawan maupun organisasi induknya yaitu Biro Keuangan Setdapropsu sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan suatu tingkatan perencanaan dan perbandingan dalam penyusunan anggaran keuangan tahun ke depan dengan perbandingan dari tahun sebelumnya. Biro Keuangan adalah salah satu Biro yang terdapat di dalam tata Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara, dimana keberadaannya sebagai pengelolaan dan administrasi keuangan daerah dengan Bendaharawan dan Biro Keuangan Setdapropsu ini bertanggung jawab langsung dan berada di bawah Gubernur Kepala Daerah. Prinsip-prinsip yang dikandung Oleh tugas Bendaharawan maupun organisasi induknya yaitu Biro Keuangan Setdapropsu dalam hubungannya dengan Hukum Administrasi negara adalah dimana Bagian dan Biro ini tersebut adalah menjalankan fungsi-fungsi aparatur pemerintah yang bersifat perencanaan (planning), antara lain yang dijalankan Bappenas, bappeda, Biro Tata Kota dan sebagainya serta Tata usaha negara yang dilakukan oleh kantor-kantor pemerintah dan sebagainya dan juga Bagian Bendaharawan maupun organisasi induknya yaitu Biro Keuangan Setdapropsu adalah merupakan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang meliputi perundang-undangan perihal pengelolaan administrasi keuangan.